

## Krisis Identitas Bangsa

Oleh: Brigida Intan Printina

BERBAGAI kasus kemanusiaan mewarnai langit Republik ini. Benturan-benturan kepentingan individu dan antarkelompok muncul ke permukaan menandai krisis identitas bangsa. Problematika antara agama dan negara sampai detik ini menjadi sorotan. Bagaimanakah seharusnya posisi yang tepat bagi agama dalam negara modern? Bahkan Indonesia pun tidak lepas dari problem ini.

Intoleransi juga tampak pada negara demokrasi Amerika Serikat. Ini membuktikan bahwa gejala-gejala intoleransi yang ada saat ini ialah wujud dari politik identitas. Politik identitas tidak hanya menguat di Indonesia namun juga di Eropa dan Amerika Serikat. Diskriminasi menimpa sebagian orang Negro di Amerika, umat Muslim Amerika, dan orang-orang Latino. Ini merupakan politik identitas yang ditunjukkan oleh Trump.

### Mampu Bercermin

Bercermin pada pemikiran Driyarkara yang kurang lebih 40 tahun lalu telah menggali pemahaman filosofis mengenai hubungan Pancasila dengan religi. Darinya Pancasila digambarkan

sebagai rumusan kodrat manusia. Dalam Pancasila itu, menjadi jelas bahwa baik agama (sebagai konkretisasi religi) maupun negara berakar pada kodrat manusia.

Negara merupakan bentuk masyarakat dalam jumlah besar manusia. Bernegara adalah suatu cara menjalankan *liebendes mit-sein* (ada bersama dengan cinta). Cinta dilaksanakan dengan pemsarakatan, yang berbentuk negara, menuntut untuk dijalankan dengan demokrasi. Negara yang memiliki dasar ini semestinya tidak ragu dalam bertindak sebagai bentuk pertahanan dan perjuangan terhadap keutuhan negara. Dalam hukum ketatanegaraan, setiap negara wajib dan tanpa pandang bulu menindak segala ancaman, pemerasan, perbuatan kekerasan karena jelas bertentangan dengan undang-undang dan negara kita adalah negara hukum

### Berkepribadian Pancasila

Secara kasat mata, masyarakat Indonesia mampu melihat setiap kepribadian berdasarkan Pancasila. Na-

mun kepribadian seperti apa yang ingin dimaknai bersama? Kepribadian bangsa yang membawa Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bukanlah dimaknai sebagai ideologi sempit yang dapat mengarahkan dan membawa orang kepada tujuan politik belaka, namun sebagai pegangan milik bersama yang senantiasa dikembangkan bagi masa depan bangsa Indonesia.

Potensi bernegara yang diuraikan Driyarkara sesungguhnya adalah kekuatan bangsa yang dihayati sekaligus mencerminkan, betapa Tuhan selalu menyertai rakyat Indonesia. Maka semakin rakyat menolak Pancasila semakin jauh pula ia dari agamanya. Driyarkara memaknai kepribadian bangsa wajib dimiliki oleh setiap warga bangsa. Driyarkara menegaskan, bahwa Bung Karno mendapatkan Pancasila itu dengan menggali dalam manusia Indonesia. Dalam penelitiannya, Driyarkara menguraikan bahwa Bung Karno berusaha mengenal dengan baik Negara Indonesia yang dirumuskan dalam lima sila. Dapat disadari bahwa

Pancasila melekat pada eksistensi manusia lepas dari keadaan apa pun.

Dalam rumusan Driyarkara, Pancasila perlu diwujudkan dengan sikap kolektif kita sebagai bangsa yang berpolitik, berekonomi maupun beraktivitas dalam bidang lain dengan berdasarkan sila pertama. Sila ke-Tuhanan tidak menuntut supaya segala-galanya kita "agamakan", tetapi tentu juga menuntut bahwa aliran-aliran radikal tidak boleh serta menentukan politik kita. Sikap yang dikehendaki sebagai warga bernegara ialah tidak menutup mata terhadap keserakahan dan tawaran-tawaran dunia, tidak buta terhadap suatu dominasi yang menghantarkan kita pada suatu eksploitasi bangsa. Dengan demikian, patutlah kita memahami gagasan Driyarkara mampu menjadi salah satu solusi memahami konflik yang melanda negeri ini. \*\*

### Brigida Intan Printina

Dosen di Prodi Pendidikan Sejarah,  
FKIP, Universitas Sanata Dharma,  
Yogyakarta

WWW.



<http://cetak.harianbernas.com/24488>